

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Politik pada hakikatnya merupakan suatu hal yang selalu ada di dalam kehidupan manusia. Di dalam individu manusia, keluarga, masyarakat, hingga negara. Yang dikatakan sebagaimana definisi dari politik itu sendiri menurut Miriam Budiarmo dalam buku pengantar ilmu politik bahwa politik sendiri merupakan suatu upaya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik<sup>1</sup>.

Kehidupan yang dimaksud adalah bagaimana upaya manusia secara individu atau berkelompok berusaha untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Dalam kehidupan bernegara segala sesuatu sudah di atur secara hukum yang di kokohkan dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan di kuatkannya kembali dengan dibuatnya Undang-Undang, maka masyarakat membutuhkan sebuah wadah yang mampu menampung aspirasi dan juga membutuhkan sarana agar dapat berpartisipasi dalam menjalankan sebuah pemerintahan.

Maka dibentuklah Partai Politik sebagai sarana masyarakat untuk turut serta dan berpartisipasi dalam proses berjalannya pemerintahan. Dibentuk dengan tujuan agar pemerintah dapat menjalankan negara sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Karena pada dasarnya bahwa sebuah negara bukanlah milik

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 13.

pemerintah namun negara dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dalam negara tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara yang konstitusional<sup>2</sup>. Pada sejarah Indonesia, partai politik sendiri merupakan sebuah sarana yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk meraih kursi pemerintahan. Sebut saja pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggunakan partai politik sebagai kendaraan politik. Karena selama Soeharto menjabat sebagai presiden, partai politik terbesar saat itu merupakan partai Golkar. Dengan berjalannya sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem yang demokratis, maka negara tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak adanya partai politik. Partai politik juga memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai artikulasi kepentingan, yang dimaksud bahwa partai politik dituntut untuk mampu memperjuangkan kehendak publik atau rakyat<sup>3</sup>. Dalam hal tersebut, dilihat bahwa jika partai politik menjalankan fungsinya tersebut maka akan memberikan dampak *win-win solution* untuk rakyat maupun partai politik. Yang pertama adalah popularitas partai politik akan meningkat, karena partai politik mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Dari dampak tersebut membuat partai politik

---

<sup>2</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 404.

<sup>3</sup> Samugyo Ibnu Redjo, *Sistem Politik Dan Kepartaian Di Indonesia: Dinamika Partai Politik dan Golongan Karya Era Orde Baru*, (Bandung: Dian Cipta, 2014), hlm. 68.

mendapatkan dukungan dari rakyat tersebut berpeluang besar untuk memenangkan pemilu.

berbeda dengan zaman Orde Lama, yang dimana pada saat itu identitas partai politik adalah ideologinya itu sendiri. Jika pada tahun 1945-1959 terdapat partai yang menganut aliran komunisme, Nasionalisme Radikal, Sosialisme Demokratik, Islam Radikal, dan Islam Modern.

Jika pada tahun 1945-1959 terdapat partai yang menganut aliran komunisme, Nasionalisme Radikal, Sosialisme Demokratik, Islam Tradisional dan Islam Modern. Selain merupakan ideologi aliran tersebut juga menjadi sebuah identitas atau ciri khas dari partai tersebut. Berbeda dengan era pasca reformasi, dimana partai politik tidak bisa dilihat berdasarkan ideologi partainya. Memang ada beberapa partai yang memiliki seperti PDIP yang bisa dibilang memiliki paham kiri. Namun, didalam praktiknya sifat partai, identitas partai, dan image partai merupakan cerminan dari ketua umumnya. Berbeda ketua umum berbeda pula tujuan dan arahnya. Semua terjadi karena di masa Soeharto yang dimana pada saat itu beliau bisa dibilang berhasil menanamkan aliran politik baru di Indonesia yaitu Pragmatisme-Pembangunanisme.

Yang kedua adalah dengan adanya wadah yang diberikan partai politik terhadap masyarakat, maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam bidang politik tidak terbatas hanya pada pemilu. Partai Politik juga memiliki fungsi sebagai Pendidikan politik bagi masyarakat. Selain dari pengkaderan partai politik, Pendidikan politik secara luas merupakan sebuah upaya yang penting bagi partai politik untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar masyarakat sadar dan mengetahui

apa hak dan kewajiban masyarakat dalam perpolitikan. Partai politik memang dibangun berdasarkan dari fungsi-fungsi tersebut.

Namun, partai politik merupakan kendaraan politik yang sah bagi kader unggul untuk menduduki kursi kekuasaan dari daerah, provinsi, hingga negara. Kader-kader tersebut dipilih secara sah sesuai dengan aturan yang ada. Didalam negara Indonesia kader tersebut dipilih berdasarkan suara terbanyak yang diberikan oleh masyarakat. Berkaca dari bahwa fakta yang ada mengatakan bahwa partai politik merupakan kendaraan politik yang paling ampuh digunakan oleh kelompok atau individu yang memiliki kepentingan.

Partai politik sendiri memainkan peranan yang penting dan strategis dalam proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Karena itu partai politik merupakan pilar dalam system demokratis. Bahkan dapat dikatakan juga bahwa partai politiklah yang menentukan jalannya demokrasi negara. Karena partai politik yang dominan didalam pemerintahanlah yang menentukan kebijakan apa yang akan di keluarkan oleh pemerintah, bukan yang minoritas.

Karena dampak besar yang diberikan oleh partai politik di dalam negara demokrasi tersebut, mulai timbulah konflik-konflik dalam tubuh partai politik baik itu konflik sosial maupun konflik politik. Konflik sendiri terjadi karena setiap individu maupun kelompok di dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda sehingga upaya kedua hal tersebut menimbulkan konflik.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Susi Fitria Dewi, Sosiologi Politik, (Yogyakarta: GRE PUBLISHING,2017), Hlm. 117.

Dalam aktivitas politik, terjadinya konflik merupakan gambaran bahwa adanya dua kepentingan yang berbeda dan saling bertubrukan. Dewasanya, perbedaan pendapat tersebut harus di hadapkan dengan saling menghargai satu sama lain. Namun, besarnya kepentingan menjadi penghadang yang besar dan dapat mengakibatkan keretakan dan ketidakharmonisan di internal partai politik. Masalah tersebut banyak di jumpai oleh partai politik di Indonesia.

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghindari perpecahan di dalam Internal partai politik itu sendiri merupakan tugas yang sangat berat karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan individu ataupun kelompok di dalam partai politik. hal tersebut tentu memberikan dampak yang signifikan pada jalannya roda partai politik di pemerintahan maupun dalam persaingan pemilu. Karena jika di dalam partai politik itu sendiri terdapat masalah yang besar dan mengancam elektabilitas partai politik, maka kader-kader partai politik berpeluang untuk keluar dan mencari partai politik yang memiliki elektabilitas yang lebih tinggi. Sebenarnya, konflik Internal partai politik itu sendiri merupakan suatu hal yang wajar terjadi bahkan, bisa memberikan dampak yang positif bagi partai tersebut.

Karena konflik sendiri merupakan kewajaran dalam dinamika organisasi, tanpa adanya konflik kita tidak bisa mengidentifikasi suatu masalah yang ada di dalam individu ataupun kelompok. Namun, konflik juga memiliki sebuah potensi yang berbahaya bagi organisasi jika tidak di tangani secara tepat. Karena adanya kepentingan yang dibawa oleh individu maupun kelompok di dalam partai politik yang menyebabkan terjadinya perpecahan bahkan terbentuknya dualisme didalam tubuh partai politik tersebut.

Partai Politik Hati Nurani Rakyat (Hanura) merupakan partai politik yang berdiri pada tanggal 21 Desember 2006. Partai Hanura didirikan oleh Jendral TNI Wiranto beserta tokoh pendiri partai politik Hanura lainnya. berbeda dari pada saat ini, pada tahun 2006 Wiranto memiliki pandangan yang bagus di mata masyarakat dilihat dari resume karir Wiranto di militer dan pernah menjabatnya sebagai Menteri pertahanan era pemerintahan Soeharto. Pada tahun 2009 Wiranto Bersama dengan Jusuf Kalla menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut data survey dari LSI, elektabilitas partai Hanura mencapai angka 1.3% dibawah Gerindra yang memiliki angka 3% dan berbeda jauh dengan Demokrat yang melambung tinggi hingga 23%. Pada tahun 2009 juga Jusuf Kalla Bersama dengan calon Wakil Presidennya Wiranto berakhir dengan perolehan 15.081.814 suara, atau hanya dengan 12,41%. Sedangkan pemenang dari pilpres tahun 2009 yaitu pasangan presiden dan wakil presiden SBY dan boediono memperoleh suara sebanyak 73.874.562, atau sebesar 60,80%.<sup>5</sup>



Gambar 1. 1 Hasil Survey LSI tahun 2014

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/lembaga-survei-indonesia/d-1062883/partai-demokrat-kalahkan-pdip-dan-golkar/> diakses pada hari Kamis, 30 September 2021 jam 8.13 WIB.

Untuk partai politik Hanura, perolehan suara sebanyak itu dan menyelesaikan persaingan dalam kontestasi politik paling tertinggi di Indonesia dan berakhir pada nomor urut ketiga merupakan sebuah pencapaian yang lumayan bagus bagi Hanura. Karena untuk partai politik yang memiliki elektabilitas sebesar 1,3% dan calon wakil presiden yang di usulkan bisa tembus hingga di pemilihan presiden dan calon presiden merupakan pencapaian yang luar biasa. Mengingat bahwa pada tahun 2009 terdapat partai politik yang sangat besar seperti Demokrat, PDIP, dan Golkar. Empat tahun setelah pemilu tahun 2009 berakhir, partai politik Hanura memberanikan diri kembali untuk maju kedalam pilpres tahun 2014 yang di mana Wiranto menjadi calon Presiden Bersama pendampingnya Hary Tanoesudibjoe sebagai calon Wakil Presiden. Bersaing dengan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, dan Prabowo-Hatta. Namun, pada akhirnya Wiranto sebagai ketua umum partai Hanura memutuskan untuk mendukung calon presiden nomor urut dua yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla. Namun karena adanya perbedaan kepentingan Hary Tanoe memutuskan untuk mendukung calon presiden nomor urut satu yaitu Prabowo dan Hatta. Wiranto menuding bahwa keputusan Hary Tanoe mendukung dan mengemban permintaan politik kedua calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan merupakan langkah Hary Tanoe sebagai pembisnis bukan sebagai kader Hanura yang mendeklarasikan bahwa Hanura hanya mendukung penuh satu calon presiden, yaitu Jokowi-Jusuf Kalla.

Yang dimana konflik tersebut berujung pada pengeluaran Hary Tanoe sebagai kader Hanura karena ketidak patuhan terhadap komitmen partai. Namun,

walaupun partai politik Hanura terlihat adanya konflik antara Wiranto dan Hary Tanoë, elektabilitas partai politik Hanura naik dari tahun 2009 yang hanya sebanyak 1,3%. Menurut data dari *Indonesian election survey* (INES) bahwa hasil survei elektabilitas partai politik jelang pemilu tahun 2014, partai politik Hanura memperoleh angka 7,5%. Berada di nomor urut empat dibawah PDIP dengan 26,7%, partai Gerindra 26,6%, dan Partai Golkar sebanyak 14,8%.<sup>7</sup>

No.	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	3.992.870	3,77%
2	6.579.498	5,26%
3	2.161.507	1,54%

**Tabel 1.1 Perolehan Suara Partai Hanura Dari Tahun 2009 Hingga 2019.**

Sumber : <https://www.antarane.ws.com/berita/140511/hasil-perolehan-suara-parpol-pemilu-2009>.<sup>8</sup>

Sementara, dalam perolehan suara yang di dapatkan partai Hanura dari tahun 2009, 2014, hingga 2019 terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup drastis. Dimana dalam tahun 2009, pada hasil pemilu yang pertama diikuti oleh Partai Hanura berhasil memperoleh 3,77% atau sebanyak 3.992.870 suara dari 104.099.785 suara yang terhitung sah. Di tahun 2014, terjadi kenaikan suara yang diperoleh oleh Partai Hanura. Dari 3,77% pada tahun 2009 menjadi 5,26% atau sebanyak 6.579.498 suara.

<sup>7</sup><https://nasional.kompas.com/read/2014/04/11/1820238/Ini.Hasil.Survei.yang.Berbeda.dengan.Hasil.Hitung.Cepat/>  
Diakses pada hari Kamis, 30 September 2021 jam 8.43 WIB

<sup>8</sup> Tabel Perolehan Suara Partai Hanura Dari Tahun 2009 Hingga 2019



Namun perolehan tersebut tidak bertahan dengan lama karena pada pemilu di tahun 2019, suara-suara yang telah di dapatkan pada pemilu-pemilu sebelumnya berbeda jauh dengan pemilu di tahun 2019 karena Partai Hanura hanya memperoleh 2.161.507 suara atau hanya 1,54%. Bankan dengan angka yang sangat kecil partai Hanura masuk kedalam kategori yang tidak memenuhi ambang batas atau *Parliamentary Treshold*.

Berdasarkan data yang ada, mengatakan bahwa dari tahun 2009 hingga pemilu tahun 2014 partai Hanura mengalami kenalikan dalam elektabilitas dimata masyarakat. Hal tersebut mengatakan bahwa partai Hanura merupakan partai politik yang patut di perhitungkan pada pemilu-pemilu yang akan datang. Pasca pilpres pada tahun 2014 yang di menangkan oleh pasangan calon nomor urut dua, Jokowi-Jusuf Kalla, terjadi reshuffle cabinet Menteri di tahun 2016.

Pada saat itu, keputusan yang menjadi pertanyaan public adalah adanya nama Wiranto yang di pilih oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Ham menggantikan peran Luhut Pandjaitan yang dialihkan menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Pertanyaan public muncul karena pada saat Wiranto masih menjadi bagian dari TNI, Wiranto sebagai Jendral dibawah perintah Soeharto melakukan beberapa tindakan pelanggaran HAM di Timor Leste, dan juga ada tundingan bahwa Wiranto lah yang bertanggung jawab atas kasus HAM lainnya seperti peristiwa 27 Juli, Kasus Semanggi, dan penghilangan aktivis Prodemokrasi pada tahun 1998.

Walaupun semua tundingan tersebut tidak bisa di klarifikasi secara lanjut dan

Wiranto sendiri selalu membantah bahwa beliau turut andil dalam kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Dengan beberapa pertimbangan dari Presiden Jokowi, ditetapkanlah Wiranto Sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM. Dipilihnya Wiranto sebagai Menteri membuat Wiranto harus merelakan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura yang menyebabkan kehilangan pemimpin partai tersebut dari awal berdiri di tahun 2006 hingga 2016. Mengingat bahwa beberapa pencapaian yang di dapatkan oleh Hanura merupakan di bawah kepemimpinan Wiranto sebagai Ketua Umum.

Diwaktu kosongnya posisi ketua umum partai politik Hanura, Wiranto menunjuk Oesman Sapta Odang sebagai Ketua umum partai politik Hanura dengan status aklamasi. Keputusan Wiranto menunjuk Oesman Sapta Odang atau yang di kenal sebagai OSO menuai banyak pertanyaan dari petinggi dan penasihat partai politik Hanura, karena adanya kekhawatiran bahwa gaya kepemimpinan OSO yang tidak sejalan dengan Wiranto. OSO merupakan seorang pembisnis sukses dan juga seorang politisi yang lihai. Dapat di lihat dari pengalaman OSO di dalam perpolitikan, OSO pernah menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah(DPD), selain pernah menjabat sebagai ketua DPD, OSO juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Pada tahun 2016. Pertanyaan juga muncul dari para penasihat dan petinggi Hanura, OSO yang saat itu menjabat sebagai Ketua MPR sangat tidak logis jikabeliau menjabat sebagai ketua umum Partai Hanura.

Namun pada akhirnya pada hari Kamis, 22 Desember 2016 satu hari setelah hari ulang tahun partai politik Hanura, OSO ditetapkan sebagai ketua umum Partai Hanura menggantikan posisi Wiranto secara aklamasi di dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). Namun harapan Wiranto yang mempercayakan masa depan Hanura tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Hampir seluruh ketua DPD Hanura digantikan oleh kolega OSO di DPD RI. Tentu keputusan tersebut membuat banyak kritik terhadap OSO yang mempertanyakan keputusannya, dari penasihat, petinggi, hingga kader-kader Hanura. Namun kritikan tersebut tidak dihiraukan oleh OSO dan tetap dengan keputusannya tersebut. Hal tersebut membuat banyaknya kader pengikut Wiranto dibuat kesal oleh keputusan OSO, karena banyaknya program dan rencana yang sudah dirancang sedemikian rupa di rubah begitu saja tanpa ada gambaran yang pasti dari OSO. Karena itu bersama dengan beberapa penasihat dan pendiri Hanura memutuskan untuk membuat Musyawarah Luar Biasa kembali dengan mengusungkan calon pemimpin yang baru, munculah nama yang di usungkan yaitu Daryatmo yang merupakan Marsekal Madya TNI. Daryatmo dinilai dapat menjalankan program-program dan rencana yang sudah disusun oleh Hanura untuk pemilu mendatang. Rencana akan dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) pada tahun 2017 tidak jadi dilaksanakan karena kurangnya persiapan dari kubu Daryatmo. Pada akhirnya satu tahun berselang pada tahun 2018 atau lebih tepatnya pada tanggal 16 Januari 2018 pada MUNASLUB, seluruh petinggi dan penasihat Hanura hadir di rapat tersebut dengan tujuan untuk menurunkan OSO dari kursi kepemimpinan partai politik Hanura.

Alasan utama dari diturunkan OSO adalah bahwa adanya mosi tidak percaya dari 27 DPD dan 400 DPC Hanura yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan OSO tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kader partai Hanura, juga dikatakan bahwa gaya kepemimpinan OSO dinilai sering meneror kader jika tidak sesuai dengan perintah OSO. Salah satu alasannya juga yaitu elektabilitas partai Hanura menurun pasca kepemimpinan Wiranto yang dilanjutkan oleh OSO. Pemecatan OSO merupakan awal dari dualisme partai Politik Hanura yang ditetapkan dalam sidang Pleno bahwa Daryatmo yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum menjadi pelaksana tugas Ketua Umum partai politik Hanura. Keputusan tersebut tidak bisa di terima oleh kubu OSO yang mengatakan bahwa Daryatmo sebagai ketua umum dianggap tidak sah karena tidak adanya SK yang di keluarkan oleh Menkum HAM. Struktur pengurus yang di bentuk oleh Daryatmo pun di nilai tidak memiliki dasar hukum apapun karena penetapan pengurus partai Hanura di bawah kepemimpinan Daryatmo tidak memenuhi syarat yang ada di AD/ART. Di dalam aturan yang tertulis di dalam AD/ART partai politik Hanura yang disahkan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) pada tahun 2019 pada bab VII pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang pengisian kekosongan jabatan dan kepengurusan ayat satu berbunyi, pemberhentian dan kekosongan jabatan ketua umum hanya dapat dilakukan melalui musyawarah nasional dan musyawarah nasional luar biasa.<sup>7</sup>

Hasil dari sidang pleno tersebut seperti membuat Hanura berjalan dengan adanya dua ketua umum, yaitu Oesman Saptia Odang sebagai ketua umum yang sah,

---

<sup>7</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hanura tahun 2019.

dan adanya Daryatmo, ketua umum yang akan diusungkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa selanjutnya. Adanya kepengurusan ganda di dalam partai Hanura yaitu kepengurusan Oesman Sapta Odang, yang merupakan kepengurusan yang sah berdasarkan hukum, dan kepengurusan Daryatmo yang di rekomendasikan oleh Sariffudin Sudding, kepengurusan yang baru namun tidak adapayung hukum yang kuat untuk menguatkan kepengurusan Daryatmo sebagai kepengurusan yang sah. Hal tersebut menjadi sebuah dilemma bagi kader partai yang mengharapkan perubahan di dalam tubuh partai Hanura dengan wajah baru sebagai ketua umum selain dari Oesman Sapta Odang yang jelas tidak disukai sebagian besar kepengurusan Hanura di tingkat cabang, daerah, maupun pusat. Namun karena adanya kelalaian dari kepengurusan Daryatmo yang tidak menyerahkan SK kepada MENKUMHAM, pergantian ketua tersebut tidak jadi terlaksanakan dan usaha tersebut bisa dikatakan sebagai usaha yang gagal.

Hal tersebut tentu membuat jalannya partai politik Hanura menjadi tidak stabil karena adanya gesekan yang keras di dalam pimpinan pusatnya dan memberikan dampak kepada elektabilitas partai politik Hanura yang terus menurun. Dampak tersebut juga membuat focus partai Hanura tidak stabil, focus partai di daerah pun menjadi terlantar karena ketidakstabilan partai di tingkat pusat. Hal ini yang menyebabkan Hanura tidak memiliki suara di beberapa daerah, dan yang menjadi pukulam telak bagi partai Hanura adalah banyaknya kader unggulan partai yang memutuskan untuk pindah menuju partai lain yang dinilai lebih stabil kondisi internalnya daripada kondisi internal di dalam tubuh partai Hanura.

## 1.2 Rumusan Masalah

Partai politik Hanura yang di bangun sesuai dengan nama partai tersebut seharusnya memiliki fungsi sebagai sarana yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk turut andil dalam perpolitikan di Indonesia dan memiliki fungsi sebagai pendidikan politik bagi masyarakat, namun tidak dapat menjalankan fungsi tersebut secara optimal pasca mundurnya Wiranto dari kursi kepemimpinan yang di gantikan oleh Oesman Sapta Odang dan dapat dibuktikan dengan adanya penurunan elektabilitas partai politik karena adanya adu kepentingan dari petinggi-petinggi partai politik Hanura. Hal ini tentu menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti permasalahan yang ada di dalam internal partai politik Hanura. Serta bagaimanabisa sebuah partai yang memiliki kenaikan elektabilitas yang lumayan tinggi bisa menurun secara drastis pasca turunnya Wiranto. Serta adanya upaya pergantian ketua umum partai Hanura yang menyebabkan sengitnya dualisme di dalam partai politik tersebut.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana bisa terjadinya konflik di dalam Partai Hanura pascaturunnya Wiranto?
2. Bagaimana akibat konflik internal terhadap Partai Hanura?
3. Apakah ada kepentingan Oesman Sapta Odang dan Daryatmo dalam konflik internal Partai Hanura?

## 1.4 Tujuan Penelitian

### Tujuan Akademis

- a. Mengkaji lebih dalam dan mengembangkan pengetahuan mengenai konflik politik dan kepentingan actor politik dalam konflik internal partai politik Hanura, dan dampak konflik tersebut terhadap elektabilitas partai politik Hanura.
- b. Memperoleh hasil penelitian mengenai peran elit politik dalam partai politik Hanura dan Langkah politis yang di ambil dalam konflik internal partai politik Hanura.
- c. Mengetahui factor-faktor yang menyebabkan konflik INTERNAL Partai politik Hanura dan mengakibatkan perpecahan di dalam tubuh partai.

### Tujuan Praktis

- a. Memperoleh hasil penelitian secara langsung dari elit di dalam partai politik serta perannya di dalam konflik internal partai politik Hanura.
- b. Mengetahui secara langsung dari kader partai politik terhadap dualisme dan konflik internal partai politik, serta factor-faktor apa saja yang mengakibatkan adanya perpecahan di dalam internal partai politik Hanura.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai Langkah dalam mendeskripsikan penelitian yang berjudul **“DUALISME PARTAI POLITIK Hanura PASCA KEPEMIMPINAN WIRANTO STUDI KASUS: KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK Hanura**

**TAHUN 2018”**. Untuk itu penulis menerapkan sistematika penulisan secara berikut.

#### BAB I

##### PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagai bab pembuka yang terdiri dari beberapa komponen yaitu: Latar belakang Masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II

##### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang dibagi menjadi sub bab tentang konsep dan teori yang digunakan, lalu literatur review, dan kerangka pemikiran. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan, teori kepentingan, dan teori fungsi partai politik

#### BAB III

##### METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas metode penelitian, yaitu yang berkaitan langsung dengan kasus dan konflik penelitian yang akan menggambarkan apa yang terjadi di dalam internal partai politik Hanura yang menyebabkan terjadinya dualisme di dalam partai



tersebut. Bab ini juga akan menjelaskan secara spesifik bagaimana metodologi penelitian yang digunakan.

#### BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum partai politik Hanura beserta tujuan partai, ideologi, dan elektabilitas partai politik Hanura.

#### BAB V DUALISME PARTAI POLITIK Hanura DI TINGKAT PUSAT PASCA KEPEMIMPINAN WIRANTO PADA TAHUN 2018

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan dan menjelaskan sesuai dengan data yang dikumpulkan. Pembahasan pada BAB V sendiri akan membahas tentang mengapa adanya dualisme didalam partai politik Hanura, dampak yang diberikan kepada partai politik Hanura karena adanya konflik Internal, dan penyelesaian yang dilakukan untuk meredam adanya dualisme di dalam partai politik Hanura. kesimpulan dari data yang sudah di teliti mengenai dualisme di dalam partai politik Hanura.

#### BAB IV KESIMPULAN

Pada BAB IV merupakan BAB terakhir berupa penutup yang berupa hasil penelitian penulis secara umum.